

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pemerintah Jakarta Pangkas Pelbagai Anggaran Belanja

Demi penghematan, anggota DPRD menyarankan pembatalan kompetisi balap mobil listrik Formula E tahun depan.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelbagai langkah penghematan untuk menekan defisit anggaran pada tahun ini. Sejumlah anggaran belanja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipangkas agar defisit anggaran tidak terus melebar.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan semua SKPD hingga kini masih menyisir program yang bisa dipangkas. "Tapi kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019

**"Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan."**

**Abdurrahman Suhaimi**  
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jakarta

DKI Jakarta tengah mengalami defisit. Berdasarkan data yang dihimpun *Tempo*, selisih antara pendapatan dan belanja DKI sempat mencapai Rp 3,187 triliun.

Saefullah menjelaskan, anggaran yang bisa dipangkas antara lain pengadaan alat tulis kantor dan konsumsi rapat. Selain itu, biaya kunjungan kerja harus dihemat. "Kunjungan kerja itu kami lihat urgensinya. Kalau hanya perlu satu orang, kirim satu orang," ujarnya.

Menurut Saefullah, anggaran yang masih bisa dihemat lagi sekitar Rp 2,3 triliun. "Ini akan berkembang terus sesuai dengan situasi dan kondisi," tuturnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengatakan sejumlah

langkah penghematan pun telah dilakukan lembaga-nya. Salah satunya adalah menghemat belanja alat tulis kantor dan konsumsi untuk rapat.

Selain itu, kata Syaefuloh, Dinas Pendidikan menghemat penggunaan kendaraan dinas. "Perawatan dan bahan bakarnya disesuaikan dengan kebutuhan," kata dia di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Rabu lalu.

Meski ada pemangkasan anggaran, menurut Syaefuloh, program seperti rehabilitasi sekolah dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap berjalan. Sebab, program tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Syaefuloh menaksir pelbagai langkah penghematan di Dinas Pendidikan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pemerintah Jakarta Pangkas Pelbagai Anggaran Belanja

bisa menghemat hingga Rp 400 miliar. "Jadi, efisiensi di kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta, Pujiono, menyatakan hal senada. Badan Aset pun telah menyisir berbagai anggaran yang bisa dihemat.

Pujiono menjelaskan, salah satu anggaran yang dihemat adalah penyediaan makanan dan minuman. Pada tahun ini, Badan Aset mengalokasikan konsumsi hingga Rp 1,17 miliar. "Enggak ada *snack* dan makan lagi pas rapat," tuturnya.

Selain itu, Pujiono melanjutkan, anggaran yang bisa dihemat ialah penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional. Pada tahun ini, Badan Aset mengalokasikan pagu anggaran Rp 480,2 juta untuk pos tersebut.

Pujiono menjelaskan, dari hasil penghematan itu, uangnya akan langsung

disetorkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta. "Untuk diplot di sistem BPKD," tuturnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengingatkan agar penghematan anggaran tidak mengorbankan program untuk masyarakat. "Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menyarankan agar program yang tidak mendesak, seperti kompetisi balap mobil Formula E, dibatalkan. "Formula E lebih baik ditunda saja biar APBD ini pro-rakyat," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Pemerintah DKI telah mengalokasikan dana tanda kesepakatan atau *commitment fee* menjadi tuan rumah Formula E pada anggaran tahun ini sebesar Rp 360 miliar. ●

## Belum Mencapai Target

PENERIMAAN pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini belum sesuai dengan target. Badan Pajak dan Retribusi Daerah mencatat penerimaan pajak hingga 17 Oktober lalu baru mencapai Rp 31,56 triliun, atau 70,86 persen dari target pajak tahun ini sebesar Rp 44,54 triliun. Berikut ini realisasi penerimaan tersebut.

No	Jenis Pajak	Proyeksi APBD-P 2019	Realisasi Penerimaan
1	PKB	Rp 8,8 triliun	Rp 6,9 triliun
2	BBNKB	Rp 5,6 triliun	Rp 4,2 triliun
3	PBBKB	Rp 1,27 triliun	Rp 1,02 triliun
4	PAT	Rp 110 miliar	Rp 79,7 miliar
5	Pajak hotel	Rp 1,8 triliun	Rp 1,3 triliun
6	Pajak restoran	Rp 3,5 triliun	Rp 2,9 triliun
7	Pajak hiburan	Rp 850 miliar	Rp 664,3 miliar
8	Pajak reklame	Rp 1,05 triliun	Rp 813,7 miliar
9	PPJ	Rp 810 miliar	Rp 605,4 miliar
10	Pajak parkir	Rp 525 miliar	Rp 445,2 miliar
11	BPHTB	Rp 9,5 triliun	Rp 3,35 triliun
12	Pajak rokok	Rp 620 miliar	Rp 397,6 miliar
13	PBB-P2	Rp 10 triliun	Rp 8,7 triliun
-	Jumlah	Rp 44,5 triliun	Rp 31,5 triliun

SUMBER: BPRD DKI  
● GANGSAR PARIKESIT